

*Al-Ulum**Volume. 14 Nomor 1, Juni 2014**Hal 211-228*

NILAI –NILAI KEARIFAN LOKAL ‘PULANGA’ UNTUK PENGEMBANGAN KARAKTER

Djailani Haluty

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

(djaelanihaluty@gmail.com)

Abstrak

Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki karakter kuat, bersumber dari nilai-nilai yang digali dari budaya masyarakatnya. Nilai-nilai kearifan lokal bukanlah penghambat kemajuan di era global, namun menjadi kekuatan transformasional yang luar biasa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal keunggulan kompetitif dan komparatif suatu bangsa. Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai kearifan lokal merupakan langkah strategis dalam upaya membangun karakter bangsa. Prosesi penobatan kepemimpinan Gorontalo ‘Pulanga’ merupakan filosofi yang mengandung dimensi karakter secara komprehensif. ‘Pulanga’ bermakna selalu mengupayakan peningkatan peran kepemimpinan lokal untuk kesejahteraan rakyat dan mendorong terciptanya sikap serta perilaku hidup individu yang menekankan keselarasan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Allah dalam melaksanakan aktivitas hidup dan kehidupan.

A great nation is a nation that has a strong character derived from the values emerged from the culture of its peoples. The values of local wisdoms are not barrier to progress in the global era; they will lead to a tremendous transformational force in improving the quality of human resources as a competitive advantage and comparative capital of a nation. Therefore, acknowledgment of the values of local wisdom is a strategic step in building the national character. ‘Pulanga’ is a philosophy that contains a comprehensive dimensional character. It is always meant an effort to increase the welfare of the people and encouraging attitudes and behavior of individuals who emphasize the harmony among human beings, between human and nature, and between human and God in making life and living.

Kata Kunci: Nilai Kearifan Lokal Pulanga, Karakter, Pemimpin

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki beragam suku bangsa, bahasa serta agama. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa pulau besar dan ribuan pulau kecil serta didukung oleh faktor ragam suku, ras, agama dan budaya. Kebudayaan lokal Indonesia yang sangat beranekaragam menjadi suatu kebanggaan sekaligus tantangan untuk mempertahankan dan mewariskan kepada generasi selanjutnya. Terdapat lebih dari 20 suku dan lebih dari 100 kebudayaan yang ada di Indonesia.

Perubahan kebudayaan yang mulai terjadi di Indonesia saat ini tampak jelas dengan adanya pergeseran budaya dari kebudayaan lokal menjadi kebudayaan luar yang lebih diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu dampak adanya globalisasi. Ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan sarana transportasi internasional telah menghilangkan batas-batas budaya setiap bangsa. Di era globalisasi, bangsa ini tengah mengalami krisis kebudayaan. Krisis kebudayaan dapat menyebabkan krisis sosial, krisis ekonomi, krisis psikologi dan berbagai jenis krisis lainnya. Fenomena globalisasi mempengaruhi dinamika masyarakat. Dinamika tersebut mengubah tingkahlaku manusia dan juga berakibat pada kaburnya nilai-nilai kemanusiaan, agama dan budaya. Globalisasi membawa empat ciri utama, yakni: dunia-tanpa-batas (*Borderless World*), kemajuan ilmu dan teknologi, kesadaran terhadap HAM, serta kewajiban asasi manusia dan masyarakat mega kompetisi. Kekhawatiran dari dampak globalisasi dititikberatkan pada generasi muda Indonesia. Hal tersebut karena generasi muda masih dalam proses mencari jati diri dengan filter diri yang seadanya. Oleh sebab itu, sangat rentan untuk terpengaruh dengan budaya luar.

Permasalahan yang dikemukakan di atas menyebabkan krisis multidimensional, yang bermuara pada krisis moral, dan krisis kepercayaan diri. Hal itu tercermin dari adanya sikap generasi bangsa yang enggan dan malu menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Akibat krisis ini, persoalan pun muncul di masyarakat, seperti korupsi, gaya hidup instan, perkelahian massal, kehidupan ekonomi yang konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif dan sebagainya. Fenomena ini telah menjadi pembahasan hangat di media massa, seminar, serta ruang publik lainnya. Jika masalah-masalah diatas terus dibiarkan maka lambat laun Indonesia akan mengalami *miss cultural* atau kepunahan budaya. Masyarakat Indonesia akan kehilangan aset terbesar warisan alam dan nenek moyang yang dimilikinya. Indonesia juga akan kehilangan jati dirinya sebagai bangsa multikultural. Hal ini akan berimbas kepada generasi bangsa yang saat ini mulai menyukai budaya yang sedang trend di dunia, dan mulai melupakan

kebudayaan serta nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, semakin terasa pentingnya karakter dalam upaya pengembangan sumber daya manusia suatu bangsa. Berbagai kajian dan fakta menunjukkan bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki karakter kuat. Nilai-nilai karakter tersebut adalah nilai-nilai yang digali dari khazanah budaya yang selaras dengan karakteristik masyarakat setempat (kearifan lokal) dan bukan “mencontoh” nilai-nilai bangsa lain yang belum tentu sesuai dengan karakteristik dan kepribadian bangsa tersebut. Jepang menjadi bangsa yang maju berkat keberhasilannya dalam menginternalisasi semangat *bushido* yang digali dari semangat nenek moyangnya (kaum samurai). Korea Selatan menjadi bangsa yang disegani di kawasan Asia, bahkan didunia berkat keberhasilannya menggali nilai-nilai luhur yang tercermin dalam semangat *semaul undong*. Demikian halnya China dengan semangat *confusianisme*, dan Jerman dengan protestan ethics-nya. Esensi kemajuan yang dicapai berbagai bangsa tersebut menunjukkan bahwa pengembangan karakter suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari aspek budaya yang selaras dengan karakteristik masyarakat bangsa itu sendiri. Budaya yang digali dari kearifan lokal bukanlah penghambat kemajuan dalam era global, namun justru menjadi filter budaya dan kekuatan transformasional yang luar biasa dalam meraih kejayaan bangsa. Oleh karena itu, menggali nilai-nilai kearifan lokal merupakan upaya strategis dalam membangun karakter bangsa di era global. Pulanga merupakan salah satu nilai kearifan lokal yang berkembang dan potensial dikembangkan, khususnya dalam ranah budaya

B. Makna Kearifan Lokal ‘Pulanga’

Kearifan lokal dalam bahasa Asing sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) atau kecerdasan setempat (*local genius*). Kearifan lokal juga dapat dimaknai sebagai sebuah pemikiran tentang hidup. Pemikiran tersebut dilandasi nalar jernih, budi yang baik, dan memuat hal-hal positif. Kearifan lokal dapat diterjemahkan sebagai karya akal budi, perasaan mendalam, tabiat, bentuk perangai, dan anjuran untuk kemuliaan manusia. Penguasaan atas kearifan lokal akan mengusung jiwa mereka semakin berbudi luhur.

Naritoom merumuskan istilah *local wisdom* dengan definisi, "*Local wisdom is the knowledge that discovered or acquired by lokal people through the accumulation of experiences in trials and integrated with the understanding of surrounding nature and culture. Local wisdom is dynamic by function of created local wisdom and connected to the global situation.*"¹

¹Wagiran et al. *Pengembangan Model Pendidikan Kearifan lokal di Wilayah Provinsi DIY dalam Mendukung Perwujudan visi Pembangunan DIY*

Definisi kearifan lokal tersebut paling tidak menyiratkan beberapa konsep, yaitu: (1) kearifan lokal adalah sebuah pengalaman panjang, yang diendapkan sebagai petunjuk perilaku seseorang; (2) kearifan lokal tidak lepas dari lingkungan pemiliknya; dan (3) kearifan lokal itu bersifat dinamis, lentur, terbuka, dan senantiasa menyesuaikan diri dengan zamannya. Konsep demikian juga sekaligus memberikan gambaran bahwa kearifan lokal selalu terkait dengan kehidupan manusia dan lingkungannya. Kearifan lokal muncul sebagai penjaga atau filter iklim global yang melanda kehidupan manusia. Kearifan adalah proses dan produk budaya manusia, dimanfaatkan untuk mempertahankan hidup. Pengertian kearifan lokal lainnya adalah: "*Local wisdom is part of culture. Local wisdom is traditional culture element that deeply rooted in human life and community that related with human resources, source of culture, economic, security and laws. lokal wisdom can be viewed as a tradition that related with farming activities, livestock, build house etc*"²

Kearifan lokal adalah bagian dari budaya. Kearifan lokal Gorontalo tentu bagian dari budaya timur, yang memiliki pandangan hidup tertentu. Berbagai hal tentang hidup manusia akan memancarkan ratusan dan bahkan ribuan kearifan lokal. Lebih lanjut dikemukakan beberapa karakteristik dari *local wisdom*, antara lain: (1) *local wisdom appears to be simple, but often is elaborate, comprehensive, diverse*; (2) *It is adapted to local, cultural, and environmental conditions*; (3) *It is dynamic and flexible*; (4) *It is tuned to needs of local people*; (5) *It corresponds with quality and quantity of available resources*; and (6) *It copes well with changes*.³

Secara garis besar, kearifan lokal terdiri dari hal-hal yang tidak kasat mata (*intangible*) dan hal-hal yang kasat mata (*tangible*). Kearifan yang tidak kasat mata berupa gagasan mulia untuk membangun diri, menyiapkan hidup lebih bijaksana, dan berkarakter mulia. Sebaliknya, kearifan yang berupa hal-hal fisik dan simbolik patut ditafsirkan kembali agar mudah diimplementasikan ke dalam kehidupan. Dilihat dari jenisnya, *local wisdom* dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori, yaitu: makanan, pengobatan, teknik produksi, industri rumah tangga, dan pakaian. Klasifikasi ini tentu saja tidak tepat, sebab masih banyak hal lain yang mungkin jauh lebih penting. Oleh sebab itu, kearifan lokal tidak dapat dibatasi atau dikotak-

Menuju Tahun 2025 Tahun Kedua. (Yogyakarta: Biro Administrasi Pembangunan, 2010), h. 12.

²Califord Greetz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, Inc, Publishers, 1973), h. 114.

³Wagiran, *Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Hamemamyu Huyuning Bawana; Identifikasi Nilai-nilai Karakter Berbasis Budaya*. (Yogyakarta: Biro Administrasi Pembangunan, 2010), h. 332.

kotak. Kategorisasi lebih kompleks dikemukakan Sungri, yang meliputi: pertanian, kerajinan tangan, pengobatan herbal, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, perdagangan, seni budaya, bahasa daerah, filosofi, agama dan budaya, serta makanan tradisional.⁴

Dalam lingkup budaya, dimensi fisik dari kearifan lokal meliputi aspek: (1) upacara adat, (2) cagar budaya, (3) pariwisata alam, (4) transportasi tradisional, (5) permainan tradisional, (6) prasarana budaya, (7) pakaian adat, (8) warisan budaya, (9) museum, (10) lembaga budaya, (11) kesenian, (12) desa budaya, (13) kesenian dan kerajinan, (14) cerita rakyat, (15) dolanan anak, dan (16) wayang. Sumber kearifan lokal yang lain dapat berupa lingkaran hidup orang Gorontalo yang meliputi: upacara penobatan Kepala Daerah, upacara kelahiran, sunatan, perkawinan, dan kematian. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipertegas bahwa kearifan lokal merupakan sebuah budaya kontekstual. Kearifan selalu bersumber dari hidup manusia. Ketika hidup itu berubah, kearifan lokal pun akan berubah pula. Kearifan lokal merupakan fenomena yang luas dan dan komprehensif. Cakupan kearifan lokal cukup banyak dan beragam sehingga sulit dibatasi oleh ruang.

‘*Pulanga*’ adalah proses penobatan dan pemberian gelar adat. *Pulanga* (pemberian Gelar Adat), pada hakikatnya mengukur seseorang dalam jabatannya sebagai sumber pola anutan dalam setiap *o’oliyo’o* (gerakan), sebagai pemimpin negeri. Pemberian *Pulanga* mengandung tanggung jawab yang berat bagi yang bersangkutan, bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat. Sebaiknya, pemimpin adalah agamawan, agar pertimbangan dan kebijakan seimbang antara akal dan hukum Islam. Pemberian *pulanga* bagi pejabat mempunyai makna mendalam dan penting. Pemberian *pulanga* membawa konsekuensi yang berat bagi yang bersangkutan; tidak saja bertanggungjawab kepada masyarakat, tetapi pertanggungjawaban dunia dan akhirat

Pemberian adat ini diberikan oleh dewan adat (*tili’o*) atau *ilalo* yang harus memenuhi enam aspek, diantaranya: (1) *Pahawe* (budi pekerti), (2) *O’oliyo’o* (tindak tanduk/sikap), (3) *Motonggolipu* (kebijaksanaan dalam pemerintahan), (4) *Motolongala’a wolo tuango lipu* (bermasyarakat), (5) *Motolo agama* (rajin dalam kegiatan keagamaan) dan (6) *Ilomata* (karya-karya yang berguna untuk orang banyak). Di kenal lima jenis gelar adat yang disematkan kepada seseorang yang telah berbuat terbaik dalam pengabdianya yakni: (1) *Ta’uwa Lo Madala*, (2) *Ta’uwa Lo Lahuwa*, (3) *Ta’uwa Lo Hunggiya*, (4) *Ta’uwa Lo Linnguwa*, dan (5) *Ta’uwa Lo Data*.

Bantayo pobo’ide adalah sebuah dewan yang terdiri atas tiga unsur utama, yaitu: wakil dari Bubato (*pemerintahan*), golongan pemangku adat,

⁴*Ibid.*, h. 332-333

dan golongan syara, ditambah dengan wakil dari Mongopanggola (*Tokoh dari para tua- tua*) yang berpengalaman, *Tula'i bala* yaitu orang-orang yang berkarya di masyarakat, dan wakil dari wanita yang berwibawa dan menjadi panutan. Wakil-wakil ini disebut *utoliya*. Keberadaan *Baate* dan *Wu'u* sesuai dengan lokasi, yakni di Suwawa hanya ada *Wu'u*, di Gorontalo disamping ada *Wu'u* juga ada *Baate*, sedangkan di Limboto hanya ada *Baate*. Pemberian *pulanga* atau gelar adat, tidak dikukuhkan dengan suatu keputusan atau ketetapan, melainkan didasarkan pada *dulohupa* para Pemangku Adat. Sebab itu, perlu dipikirkan untuk memformalkan Lembaga Pemangku Adat.

Untuk pelaksanaan upacara, dipilih waktu yang terbaik, yaitu hari dan tanggal pelaksanaannya membawa keberuntungan. Tempat pelaksanaan upacara di "*yiladiya*" (istana). Sekarang, yang dimaksud dengan *yiladiya* adalah rumah dinas (jabatan) bupati/walikota. Ada aturan adat yang menyatakan bahwa apabila upacara penobatan dan penganugerahan gelar adat *pulanga* diberikan kepada seorang walikota Kota Gorontalo, maka semua pelaksanaannya adalah dari Kabupaten Gorontalo. Begitu juga sebaliknya, apabila seorang bupati Kabupaten Gorontalo dinobatkan dan diberi gelar adat *pulanga*, maka semua pelaksanaannya dari Kota Gorontalo. Hal ini diistilahkan dengan *huyula* (gotong royong) yang telah diberlakukan sejak perjanjian perdamaian antara Kerajaan Limboto dan Kerajaan Gorontalo pada tahun 1673 M. Isi dari aturan pelaksanaan upacara tersebut adalah: *Ubuwa la'I-la'I* (yang perempuan bertindak laki-laki), *Ula'I buwa-buwa* (yang laki-laki bertindak perempuan), dan *To pohutu teeto teya* (acara disana-sini).

Makna dari *tuja'i* tersebut adalah bahwa kedua daerah tidak membedakan pelaksanaan upacara-upacara dalam segi tanggung jawab, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan. Semua hal tidak ada perbedaan pada kedua daerah.

C. Kearifan Lokal Gorontalo

Munculnya kearifan Lokal (*local genius*) di Gorontalo terkait erat dengan proses akulturasi kebudayaan. Akulturasi kebudayaan ini diperoleh dari kemampuan manusia membentuk, memanfaatkan, mengubah hal-hal yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Dalam tulisan ini dikemukakan salah satu contoh kearifan lokal dalam konteks perspektif Ragam Sastra Gorontalo. Nani Tuloli mengemukakan beberapa ragam sastra kearifan lokal Gorontalo diantaranya⁵:

⁵Nani Tuloli *et all.* (ed.) *Membumikan Islam: Seminar Nasional Pengembangan Kebudayaan Islam Kawasan Timur Indonesia* (Gorontalo: Pusat

Pertama, ragam yang berhubungan dengan adat diantaranya ; (1) *Tujaqi*, yaitu puisi adat yang diucapkan pada kegiatan peradatan perkawinan, penobatan, dan pemberian gelar. Ragam ini termasuk ragama asli budaya Gorontalo yang telah disesuaikan dengan ajaran Islam; (2) *Palebohu* dan *Tahuda*, yaitu puisi adat yang dipakai pada upacara pemberian nasihat. Biasa disebut pidato adat. *Pale bohu*, merupakan nasihat dari orang tua kepada yang muda atau dari tokoh adat kepada siapa saja. *Tahuda*, merupakan nasihat dari seorang mantan pemimpin kepada pemimpin yang baru. *Pale bohu* adalah ragam budaya asli Gorontalo yang diisi dengan Nuansa Islam. Sering dimasukkan ke dalamnya ayat- Al-Qur’an dan Hadis Nabi. (3) *Tinelo*, yakni sejenis syair yang berisi sanjungan kepada seorang tokoh, hiburan yang mengalami kedukaan (*takziah*), dan doa. Jenis *Tinilo* antara lain: (a) *Tinilo kola-kola*, syair pengantaran harta kawin (b) *Tinilo Talanggeda*, syair penjemputan pemimpin baru, (c) *Tinilo Mopopiito*, syair menidurkan pemimpin atau orang yang disayang, (d) *Tinilo Pagita*, syair berduka (*takziah*). (4) *Mala-Mala*, puisi ini berbentuk seruan untuk menyampaikan pengumuman atau maklumat atau *monggumo* (memaklumkan).

Kedua, ragam yang berhubungan dengan pandangan hidup dan pola hidup masyarakat. Jenis Ragam ini misalnya: (1) *Taleningo*, yakni puisi yang banyak mengungkapkan cara-cara hidup yang sebaiknya, cara bergaul agar sesuai dengan norma, soal-soal kelahiran, kematian, dan persiapan untuk menuju akhirat. (2) *Leningo*, kata-kata arif, yaitu ungkapan orang tua-tua atau leluhur yang dijadikan pedoman dalam bertingkah laku.

Ketiga, ragam yang berhubungan dengan pergaulan muda-mudi. Ragam ini sama dengan pantun dan syair. Ragam ini biasanya dilagukan yang berisi ungkapan perasaan bercinta, berkelakar, bekerja, dan beristirahat. Ada dua jenis ragam ini, yaitu yang diungkapkan sendiri, yaitu *lohudi*, dan yang diungkapkan dalam sistem berbalas-balasan yang disebut *pangia lo hungo lo poli*. Keduanya berisi harapan-harapan luhur, seperti kasih sayang, kebahagiaan, keindahan, kecantikan, kegagahan dan sebagainya.

Keempat, ragam yang terkait dengan sejarah atau pemberitaan peristiwa. Ragam ini diantaranya: *tanggomo*, yakni berisi peristiwa nyata, dan *wulito*, yakni prosa yang berisi sejarah kejadian atau kepahlawanan seorang tokoh. Isinya lebih terkenal terkait dengan kerajaan pada masa lalu, yaitu keberadaan suatu kerajaan atau silsilah tokoh-tokoh pemimpin yang terkenal.

Kelima, ragam yang berasal dari luar budaya Gorontalo berupa: *buruda*, *syairi*, dan *barjanji*. Yang terakhir adalah *miqiraji*, yakni ceritera

perjalanan Isra Miraj yang ditulis dalam aksara Arab Melayu dan dibacakan secara bergantian pada setiap peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW.

D. Pembangunan Karakter dalam Sejarah Kepemimpinan Kerajaan Gorontalo

Penduduk yang mendiami dataran Gorontalo pada masa pra-Islam terdiri atas kelompok-kelompok keluarga (suku) yang disebut *Ngalaa*⁶. Kelompok-kelompok keluarga ini pekerjaannya adalah bertani. Masyarakat pada saat itu sangat percaya pada takhayul. Mereka memandang alam mempunyai kekuatan yang menguasai pikiran manusia⁷. Agama penduduk yaitu animisme, yang merupakan bentuk pengakuan terhadap kekuatan di luar dirinya yang diungkapkan melalui penyembahan pada roh-roh nenek moyang atau benda-benda yang dianggap keramat di sekitarnya⁸. Kelompok keluarga ini tinggal pada petak-petak (*lala*) rumah yang besar disebut *laihe* yang dibangun di tengah hutan atau wilayah pedalaman. Dalam satu *laihe* tinggal beberapa keluarga seketurunan dari seorang ayah dan seorang atau beberapa ibu. Dalam *laihe* inilah berkembang sistem kepemimpinan. Setiap *ngalaa* dipimpin oleh orang tertua dalam kelompok keluarga atau suku yang berwibawa, berpengalaman dan berpengetahuan disebut *Pulu laihe* (= inti rumah). Kumpulan *laihe* sebanyak lima sampai tujuh pada satu tempat disebut *lemboa*. *Lemboa* ini dipimpin oleh kakek atau nenek dari kelompok-kelompok keluarga tersebut. Pemimpin *lemboa* disebut *bantalo* (kandungan)⁹.

Suku-suku ini berkembang menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang disebut *linula*. Pembentukan *linula* diperkirakan terjadi setelah tahun 1383. Suku-suku ini masing-masing mempunyai wilayah sendiri. Beberapa suku yang penting di antara suku-suku tersebut yaitu *Hunginaa*, *Lupoyo*, *Bilingata*, *Wabu*, *Biawaho* dan *Pandengo* (berada di wilayah Gorontalo) dan

⁶B. J. Haga, *Lima Pahalaa; Susunan Masyarakat Hukum Adat dan Kebijakan Pemerintah di Gorontalo*, terj. LIPI (Gorontalo: IKIP Negeri Gorontalo, 1931), h. 214.

⁷A. S. Niode, *Gorontalo; Perubahan Nilai-nilai Budaya, Pranata Sosial dan Ideologi Lokal* (Manado: Penerbit Media Pustaka dan Yayasan Pohalaa, 2002), h. 41.

⁸H. Juwono dan J. Hutagalung, *Limo lo Pohalaa; Sejarah Kerajaan Gorontalo* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2005), h. 19.

⁹S. R. Nur, *Beberapa Aspek Hukum Adat Tatanegara Kerajaan Gorontalo pada Masa Pemerintahan Eato (1673-1679)* "Disertasi, Universitas Hasanudin: Ujung Pandang, 1979, h. 36.

Tibawa, Dunggala, Butayo dan Timiloto (berada di wilayah Limboto)¹⁰. Nur¹¹ mengemukakan bahwa *linula* adalah persekutuan teritorial, persatuan keluarga bukan merupakan penjumlahan individu semata, dan kesatuan religius. Hal ini karena setiap *linula* mempunyai batas-batas teritorial sendiri. *Linula* dikepalai oleh seorang *Olongia* atau orang terkemuka¹². *Olongia*, yaitu orang terkemuka dipilih berdasarkan ketokohan dan keteladanannya sesuai dengan teori sifat dan teori perilaku. Teori ini menganggap bahwa pemimpin memiliki sifat-sifat yang lebih unggul yang membedakan dia dari pengikutnya¹³.

Interaksi antara *linula-linula* yang intensif terjadi, baik dalam bentuk kegiatan perdagangan, pertanian dalam memenuhi kebutuhan bersama, dan perkawinan antar anggota *linula*. Akibatnya, batas-batas wilayah dan keturunan beberapa *linula* semakin kabur. Oleh karena itu, persatuan antar *linula* mulai digagas oleh para pimpinan dan tokoh adat.

Usaha mempersatukan *linula-linula* dilakukan melalui tiga perjanjian yaitu (1) perjanjian *tapalu-tapahula* atau perjanjian delapan *linula*; (2) Perjanjian *ito limo lota* atau perjanjian kita berlima; dan (3) Perjanjian *motoli dile* atau perjanjian suami dan isteri-isteri¹⁴. Persekutuan dari *linula-linula* membentuk kerajaan-kerajaan kecil yang disebut *lipu*. Kerajaan-kerajaan tersebut meliputi Kerajaan Wada, yaitu kerajaan tertua, Kerajaan Suwawa (900?), Kerajaan Limbotto (1330?), Kerajaan Gorontalo (1385)¹⁵, Kerajaan Bolango (1550), Kerajaan Atinggola (1557), dan Kerajaan Boalemo (1845). Di antara lima kerajaan ini, Kerajaan Gorontalo dan Kerajaan Limboto adalah kerajaan-kerajaan yang besar. Kerajaan Gorontalo merupakan persekutuan dari 17 *linula* yang selanjutnya berkembang menjadi 19 *linula*. Maharaja pertama atau Raja kesatuan dari Kerajaan Gorontalo yaitu Ilahudu¹⁶.

Kepemimpinan pada masa kerajaan Gorontalo dijalankan berdasarkan hukum adat yang berlaku pada masing-masing *linula*. Adanya pemimpin menunjukkan bahwa masyarakat pada masa itu telah menyadari pentingnya pemimpin. Kepemimpinan pada kerajaan-kerajaan tersebut

¹⁰ B. J. Haga, *Lima Pahalaa*, *op.cit.*, h. 2.

¹¹ S. R. Nur, *Beberapa*, *op.cit.*, h. 39.

¹² B. J. Haga, *Lima Pahalaa*, *op.cit.*, h. 2-3.

¹³ S. R. Covey, *The 8 Habit*, hlm. 532

¹⁴ *Ibid.*, h. 17.

¹⁵ Lipoeto, *Boekoe Poesaka Gorontalo* (Gorontalo: Pertjetakan Ra'jat Gorontalo, 1943), h. 22.

¹⁶ Komunikasi dan diskusi dengan Deka Usman, narasumber sejarah Gorontalo.

dikendalikan oleh Maharaja (*Olongia*) dan Dewan Rakyat atau *Bantayo Poboide* (=Bangsal Bicara). Maharaja atau *Raja Lipu* dipilih berdasarkan permufakatan 'bulat' para Raja-raja *linula* yang merupakan anggota dari *Bantayo Poboide*. Syarat-syarat menjadi calon Maharaja adalah sebagai berikut: (1) kepribadian yang luhur (*bo hale obibia*); (2) keturunan bangsawan; dan (3) dipilih secara bulat atau aklamasi oleh *Bantayo Poboide* (Dewan Rakyat)¹⁷.

E. 'Pulanga' dan Kepemimpinan yang Berkarakter

Pemimpin yang diberi gelar *Ta'uwa* harus memenuhi dua persyaratan: (1) telah menghasilkan karya-karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat disebut *Ilomata*; dan (2) dinilai oleh masyarakat adat sebagai orang yang memiliki sifat-sifat kepemimpinan *Mo'odelo*¹⁸. Sifat-sifat kepemimpinan *Mo'odelo* adalah sifat-sifat kepemimpinan yang sesuai dengan perintah Allah SWT dan ajaran-ajaran Islam yang berperan sebagai '*Mo'oiyoto Allah, wo lo Nabi mursalah lo wali u sagala*' yang artinya: penyambung titah Allah swt., sabda para Nabi dan para Wali). *Ta'uwa* menjadi wakil Tuhan di dunia (khalifah) dan sifat-sifat Tuhan dibagikan (*pilo pobo'o liyo*) kepadanya. Botutihe¹⁹ mendeskripsikan sifat-sifat kepemimpinan *Mo'odelo* memiliki karakteristik sebagai berikut:

Pertama, *Dudelo*, yang bermakna bawaan atau sifat-sifat bawaan sejak lahir, dan pembawaan atau perilaku. *Dudelo* memiliki enam aspek, yaitu: (1) *Totayowa* adalah penampilan seseorang dalam mengerjakan sesuatu; (2) *Ayuwa* adalah karakter kepribadian; (3) *Woyoto* adalah kerendahan hati dan sifat lemah lembut; (4) *Timamango* adalah keramahmatan dan sifat bersahabat kepada siapa saja; (5) *Pi'ili* yaitu kesucian hati yang dalam konteks keislaman terdiri atas sifat *nafsiah*, *salbiyah*, *ma'aniyah*, dan *ma'anawiyah* sebagaimana sifat yang dilekatkan pada Maharaja Eyato; dan (6) *Dupapa* adalah penghambaan kepada Allah SWT dan penghormatan terhadap seluruh ciptaannya. *Dudelo* menjadi pertimbangan utama dalam memilih pemimpin.

Kedua, *Mo'ulindlapo* adalah sifat yang merupakan gabungan dari kecerdasan berpikir dan kecekatan bekerja. Kecerdasan berpikir dinilai dari: (1) *Huhuta'a*, yaitu landasan dan paradigma berpikir pemimpin; (2) *Pomilohu* yaitu visi pemimpin; (3) *Podungohu* yaitu kemampuan

¹⁷Kaluku, *Lukisan Segi Kebudayaan dari Limo lo Pohalaa (Gorontalo)*, Djilid I (Gorontalo: Penerbit Rumah Sangkar Gelatik Telaga Gorontalo, 1962), h. 14-26.

¹⁸ M.Botutihe, *Mo'odelo*, *op.cit.*, h. 3.

¹⁹ *Ibid*, h. 29-139.

mendengarkan dan memilah-milah informasi; dan (4) *Pohuhama* yaitu kemampuan memahami pesan yang disampaikan.

Ketiga, Dulohupa yang berarti musyawarah mufakat. Prinsip-prinsip *Dulohupa* yang harus dipegang teguh oleh pemimpin yaitu: (1) *Heluma*, yaitu dalam setiap musyawarah harus ada permufakatan yang disepakati dan ditaati; (2) *Awota wawu Bilohe*, yaitu memiliki pergaulan dan hubungan silaturahmi yang luas dan menghargai orang lain; (3) *Po’uda’a wawu tijuju*, yaitu etika dalam mengungkapkan pendapat dan menanggapi pendapat kepada pimpinan; dan (4) *Basalata*, yaitu prinsip sama rata atau tidak membedakan dalam setiap pelaksanaan musyawarah.

Keempat, Huyula yang bermakna gotong royong secara sukarela. Pemimpin harus membuktikan bahwa dirinya telah bekerja secara huyula untuk kepentingan umum.

Kelima, Balata-Yipilo adalah ketegaran dan kekokohan dalam menghadapi kesulitan dan kesenangan, ketegasan dalam mengambil keputusan dan keberanian/keterbukaan dalam menerima kritik.

Keenam, Dunguto, Ponuwo dan Loyode. *Dunguto* adalah kecintaan terhadap sesama manusia, lingkungan dan segala ciptaan Allah yang menjadi landasan bertutur kata. *Ponuwo* bermakna mengayomi, melindungi dan memelihara segenap rakyatnya dengan kasih sayang yang tulus tanpa pamrih. *Loyode* memiliki arti membaur dengan masyarakat dan menjaga masyarakat dari pengaruh negatif orang asing.

Ketujuh, Tinepo wawu Tombula’o yaitu memberikan penghargaan terhadap orang yang berprestasi dan orang yang memiliki ahlak yang baik. Dalam konteks kepemimpinan modern yaitu pemberian penghargaan dan sanksi (*rewards and punishment*).

Kedelapan, Ikilale yaitu memegang teguh tekad dan janjinya. Pemimpin yang memiliki ciri *ikilale* yang baik ditandai dengan teguh memegang kata-katanya, jujur, tidak mengobral janji dan menunaikan janjinya.

Raja diberi gelar *pulanga* tiga bulan setelah dilantik. Hal ini berarti bahwa sebelum diangkat menjadi Raja atau pemimpin, orang tersebut telah menghasilkan karya-karya nyata bagi masyarakat dan telah memiliki sifat-sifat *Mo’odelo*. Dua persyaratan ini sulit dipenuhi dalam konteks kepemimpinan pemerintahan saat ini. Karya-karya nyata akan ditunjukkan setelah seorang pemimpin menjabat dalam waktu lebih dari tiga bulan setelah pelantikannya.

Gelar *Ta’uwa* terdiri atas lima jenis yaitu: *Ta’uwa lo Madala*, *Ta’uwa lo Lahuwa*, *Ta’uwa lo Hunggia*, *Ta’uwa lo Lingguwa* dan *Ta’uwa lo Daata*. Gelar *Ta’uwa lo Madala* diberikan kepada pemimpin yang memiliki karakter atau sikap yang tidak mementingkan kenikmatan dunia. Gelar *Ta’uwa lo Lahuwa* diberikan kepada pemimpin yang arif dan tegas

menerapkan aturan perundang-undangan dan hukum Allah untuk menyelesaikan masalah. Dampaknya adalah ketaatan masyarakat terhadap aturan dan ketenangan masyarakat. Gelar *Ta'uwa lo Hunggiya* diberikan kepada pemimpin yang ramah, arif, bijaksana, penuh kekeluargaan dan lebih mementingkan rakyatnya dari pada dirinya sendiri serta menghargai fatwa para tokoh masyarakat. *Ta'uwa lo Lingguwa* diberikan kepada pemimpin yang kuat karena wawasan yang luas, arif karena keluasan ilmunya, tegas dalam tindakan dan konsekuen dengan apa yang menjadi keputusan. *Ta'uwa lo Daata* diberikan kepada pemimpin yang dinamis dan inovatif dan kepedulian terhadap pengembangan sumberdaya manusia.

Sebelum diberi gelar *Ta'uwa*, seorang raja atau pemimpin pemerintahan tidak boleh di'sembah' dalam kedudukan adat, tetapi hanya boleh dihormati dan dihargai. Penyembahan terhadap *Ta'uwa* adalah simbol penyembahan terhadap Allah swt., karena *Ta'uwa* adalah wakil Tuhan dengan sifat-sifat ketuhanan yang dibagikan kepadanya.

Pemberian *pulanga* memiliki tiga makna yaitu: (1) sebagai peringatan kepada pemimpin untuk konsisten mempertahankan makna di balik gelar yang diterimanya; (2) kepemimpinan harus sejalan dengan syariah; (3) sebagai peringatan kepada rakyat yang dipimpin untuk hormat dan taat kepada pemimpin yang telah dipilihnya sebagaimana firman Allah swt.: '*ati'ullâh, wa 'atûrrasûl, wa ulil amri minkum*'; dan (4) sebagai bentuk motivasi kepada pemimpin dan rakyat untuk berbuat terbaik bagi lingkungannya.

F. Transformasi Nilai-nilai Kearifan Lokal untuk Pendidikan Karakter

Paulo Freire dalam Wagiran menyebutkan bahwa Pendidikan berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu lekat dengan situasi konkret yang mereka hadapi. Wagiran menyebutkan bahwa dengan dihadapkan pada problem dan situasi konkret yang dihadapi, peserta didik akan semakin tertantang untuk menanggapi secara kritis. Seiring dengan pendapat ini, Suwito mengemukakan bahwa pilar pendidikan kearifan lokal meliputi (1) membangun manusia berpendidikan harus berlandaskan pada pengakuan eksistensi manusia sejak dalam kandungan; (2) pendidikan harus berbasis kebenaran dan keluhuran budi, menjauhkan dari cara berpikir tidak benar dan *grusa-grusu* atau *watonsulaya*; (3) pendidikan harus mengembangkan ranah moral, spiritual (ranah afektif) bukan sekedar kognitif dan ranah psikomotorik; dan (4) sinergitas budaya, pendidikan dan pariwisata perlu dikembangkan secara

sinergis dalam pendidikan yang berkarakter.²⁰

Transformasi nilai-nilai kearifan lokal Gorontalo dapat di implementasikan dalam masyarakat, baik melalui jalur formal maupun informal. Secara formal, nilai-nilai kearifan lokal ‘*pulanga*’ maupun *ragam sastra lisan Gorontalo* misalnya, dapat diintegrasikan melalui jalur pendidikan formal (pendidikan Dasar hingga Perguruan Tinggi) maupun kebijakan forma Pemerintah Daerah. Kebijakan ini dapat dilaksanakan dalam berbagai event dan *ceremony* pemerintahan. Selain itu, secara informal transformasi nilai-nilai kearifan lokal dapat dilakukan melalui kegiatan sosial kemasyarakatan. Kegiatan ini tentunya bagian dari upaya pelestarian budaya Gorontalo sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah No 23 tahun 2011 tentang pelestarian Budaya Gorontalo.

Sektor pendidikan sebagai jalur yang dinilai efektif dalam menyosialisasikan nilai-nilai kearifan lokal tentunya memegang peranan strategis sebagai agen konstruktif perbaikan masyarakat. Jalur Pendidikan tidak hanya mengembangkan intelektualitas peserta didik namun masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan berperan menanamkan nilai-nilai budaya, kebijakan lokal, nilai-nilai kebangsaan dan mengembangkan potensi. Pendidikan dan kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat, dalam arti keduanya berkenaan dengan suatu hal yang sama yaitu pengembangan nilai. Pendidikan memainkan peranan dalam agen pengajaran nilai-nilai budaya. Pendidikan yang berlangsung adalah suatu proses pembentukan kualitas manusia sesuai dengan kodrat budaya yang dimiliki. Nilai-nilai kebudayaan bukan sekedar dipindahkan dari satu bejana ke bejana lain yaitu kegenerasi mudanya, tetapi dalam proses interaksi antara pribadi dengan kebudayaan, karena pribadi merupakan individu yang kreatif bukan pasif.

Dalam konteks prosesi ‘*pulanga*’ dapat dikemukakan beberapa nilai-nilai pengembangan pendidikan karakter diantaranya:

Pertama, jika menilik syarat-syarat menjadi seorang pejabat dalam perspektif adat Gorontalo maka terdapat beberapa syarat yang diajukan untuk menjadi pemimpin (khalifah). Syarat-syarat yang dikemukakan mengandung nilai-nilai/karakter yang baik diantaranya: (1) punya wibawa (*O Tombulu*); (2) Teliti (*O Tinggapo*); (3) Pandai, berilmu (*Motomungga*); (4) Sabar, tahan segala cobaan (*Motuwe*); dan (5) Jujur, adil (*Motulide*), (6) Cermat (*Motidito*); (7) Bijaksana (*Motinepo*); (8) tegas (*Motombulao*); (9) Berani (*Buheli*) dan (10) Rendah hati (*Moleato*).

Kedua, dalam sejarah kepemimpinan kerajaan di Gorontalo menyebutkan, selain syarat tersebut di atas juga terdapat syarat yang diajukan oleh Dewan

²⁰Yuwono Sri Suwito, Pendidikan Berbasis Budaya Yogyakarta, “*makalah*” disampaikan pada sarasehan Budaya Selasa Wagen di Bangsal kepatihan, tanggal 15 Juli 2008.

Raja-raja *Linula* pada saat pelantikan Raja Pertama Tolangohula di lingkungan kerajaan Limbotto yakni: (1) Jika raja tidak sopan, tidak jujur, tidak memperhatikan persekutuan hukum, maka ia diusir dari negeri Limbotto (*Potuota Puluala*), (2) yang berhak dan berwenang memerintah Kerajaan Limbotto adalah Dewan *Patoo Tongga li Lipu*. Raja adalah simbol persatuan dari kelima *Linula* dalam persekutuan, (3) Raja tidak berwenang membuat peraturan hukum, yang berwenang adalah Lima *Linula* yang membentuk Kerajaan Limbotto, (4) Tugas Raja adalah untuk memakmurkan negeri serta rakyatnya (*moopoopio lahua*), (5) Raja harus berkarya yang berguna bagi masyarakat saat ini sampai generasi mendatang dengan tidak menghiraukan hambatan dan dengan penuh kesabaran memimpin rakyatnya. Sajak yang berhubungan dengan keharusan ini yaitu: 'Jika ada hambatan, Kami nenek menghadapinya, Untuk mendukungmu Raja. Demi Rakyat negeri ini, jangan bertindak sewenang-wenang, Jagalah jangan sampai binasa. Dengan banyak bersabar, sampai mencapai karya, yang menjadi pusaka, kepada anak dan cucu tercinta', (6) Raja diibaratkan sebagai seutas sutra yang digenggam oleh para Raja *Linula*, sebagai lambang persatuan. Raja harus diperlakukan dengan hati-hati, sopan dan halus. Hal ini ditunjukkan oleh sajak (*tujai*) yang diucapkan pada penobatan Gubernur, Bupati, Walikota di Gorontalo yaitu '*Ami motitiaito, To dilomango ngopihito*' yang artinya *Kami berpegang kepada sutera segenggam*.

Dimensi pendidikan karakter yang perlu dikembangkan dalam pesan '*pulanga*' ini adalah bahwa apapun bentuk kekuasaan yang dimiliki, termasuk Raja/Kepala Daerah adalah amanah dari rakyat, dan wajib untuk dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban dapat mewujudkan dalam tutur kata, sikap dan niat. Petuah (*Tujai*) lainnya menegaskan "*Huhutu lo ta to ti taato. Bo tae-tae ti huhutu lo ta ti bawa*" (tindakan orang-orang di atas/penguasa berlandaskan perbuatan orang-orang di bawah/rakyat). Perbuatan yang ditunjukkan oleh pemimpin di berbagai lini (pemerintah, tokoh agama, perempuan dan adat) adalah refleksi dari perilaku rakyat/masyarakat atau yang di pimpinnya. Pesan universal dikandung pepatah ini adalah pentingnya membangun karakter masyarakat, bawahan dan peserta didik di sekolah, sebab harapan adanya kepemimpinan yang berkarakter akan dapat di wujudkan jika masyarakat juga berkarakter. Oleh sebab itu, upaya untuk membentuk karakter bersifat simbiosis-mutualisme. Karakter kepemimpinan adalah wujud dari karakter rakyat yang dipimpinnnya.

Ketiga, Kekuasaan yang diperoleh Raja dan pejabat kerajaan karena persetujuan dan kerelaan dari rakyat. Oleh karena itu, raja dan para pejabat kerajaan dapat diruntuhkan oleh rakyat²¹.

²¹S. R. Nur, A. R. Mustafa, Syamsudin Pasama dan Sri Susanti S. Nur, *Kerakyatan*, hlm. 122.

<i>Dupoto, dupoto lo ito Eya</i>	<i>Angin, angin Tuanku</i>
<i>Taluhu, Taluhu lo ito Eya</i>	<i>Air, air Tuanku</i>
<i>Huta, Huta Lo ito Eya</i>	<i>Tanah, Tanah Tuanku</i>
<i>Tulu, Tulu Lo ito Eya</i>	<i>Api, Api Tuanku</i>
<i>Tau, Tau Lo ito Eya</i>	<i>Orang, Orang tuanku</i>
<i>Bo Dila Polulia to hilao Eyanggu</i>	<i>Namun Janganlah dijadikan Pemuas Nafsu Tuanku</i>

Nasihat ini memberi pesan tentang nilai-nilai keadilan, kejujuran dan sikap rendah hati, meliputi: (1) segala sesuatu di percayakan pengelolaannya kepada pemimpin, (2) pemimpin diharapkan mengelola sumber daya itu demi kepentingan rakyat, dan (3) dalam memimpin tidak boleh serakah, tetapi haruslah adil, jujur dan rendah hati. Seseorang dinilai bukan dari materi dan keududukannya, tetapi dari akhlaknya. Sebagai pendukung akhlak, maka ada empat sifat yang menjadi tolok ukur baik-tidaknya seseorang, yakni: sifat *Piqili* (perangai), *popoli* (pembawaan), *qauli* (perkataan), dan *qalibi* (kalbu/nurani). Kalau keempat pendukung ini terpelihara dengan baik, maka seseorang dipandang baik oleh masyarakat serta di hormati.²²

Keempat, dalam menjalankan kepemimpinan di Kerajaan Gorontalo dan Kerajaan Limbotto²³, Raja dibatasi oleh beberapa aturan diantaranya: (1) Tidak dibenarkan menggunakan kekerasan, keangkuhan serta kekuasaan. Pemerintah dinasihatkan untuk bertindak sebagai induk ayam membawa anak-anaknya mencari makan (*biahe lo maluo, moheyi kulu-kuluo*=berjalan kesana kemari berkotek-kotek). Perintahlah rakyat dengan segala rasa kasih sayang dan cinta (*lodudeo wau woyohu*). Pemerintah yang berdasarkan kekerasan dikatakan adat sebagai '*Biahe lo munggia, Tau hilahi-lahia*' (memerintah seperti ikan hiu sehingga rakyat lari kesana kemari mencari perlindungan), (2) Pemerintahan berdasarkan perasaan kesusilaan (*tinepo*)

²²Nani Tuloli et all. (ed.) *Membumikan Islam, op.cit.*, h. 71.

²³Pada Kerajaan Limbotto, kedudukan tertinggi pemerintahan dipegang oleh Kepala Adat (Baate) yang mengetuai *Bantayo Poboide* (Dewan Perwakilan Rakyat). *Bantayo Poboide* bertugas untuk memilih, mengangkat dan menurunkan raja dari singgasananya, serta membuat peraturan-peraturan hukum. Maharaja atau *Olongia* berada di bawah Kepala Adat. *Olongia* (maharaja) mempunyai beberapa fungsi: yaitu sebagai pucuk pimpinan pemerintahan, ketua dewan raja-raja (*Patoo Tongga lo lipu*), dan ketua keamanan dan pertahanan. Dalam Kerajaan Gorontalo, Maharaja (Raja) menguasai dua pilar pemerintahan yaitu: (1) legislatif (*Bantayo*) dan (2) eksekutif (*Bubato*). Dalam Kerajaan Limbotto, *Bantayo* (*Legislatif*) tidak dimasukkan ke dalam kekuasaan raja karena badan ini adalah badan tertinggi yang berada di atas Raja.

dan rasa kekeluargaan (*ongongalaa*), (3) Raja berkewajiban melindungi rakyat dari kekacauan, (4) Raja dan pejabat kerajaan diminta untuk bersifat jujur sebagaimana tercermin dalam sajak (*tujai*) yang dinyanyikan apabila terjadi perbedaan pendapat antara Raja dan Rakyat²⁴.

<i>Ti mongoli to huidu</i>	<i>Kamu di atas/pemerintah,</i>
<i>Motulete motulide</i>	<i>cermat dan jujurilah,</i>
<i>Deu mobibidu</i>	<i>jika kamu menipu,</i>
<i>Motonggabu molilidu</i>	<i>longsor menggelinging jatuh.</i>
<i>Ti mongoli to datahu</i>	<i>Kamu rakyat,</i>
<i>Motulete mohayahu</i>	<i>cermat dan selektiflah,</i>
<i>Deu mololahu</i>	<i>jika lepas/bersalah,</i>
<i>Hutia wau bulahu</i>	<i>dipukul dengan rotan dan diikat</i>

G. Kesimpulan

Di era globalisasi, bangsa ini sedang mengalami krisis kebudayaan. Krisis kebudayaan dapat menyebabkan krisis sosial, krisis ekonomi, krisis psikologi dan berbagai jenis krisis lainnya. Fenomena globalisasi mempengaruhi dinamika masyarakat. Dinamika tersebut mengubah tingkah laku manusia dan juga berakibat pada kaburnya nilai-nilai kemanusiaan, agama dan budaya. Kearifan lokal bukanlah penghambat kemajuan dalam era global, namun justru menjadi filter budaya dan kekuatan transformasional yang luar biasa dalam meraih kejayaan bangsa. Oleh karena itu, menggali nilai-nilai kearifan lokal merupakan upaya strategis dalam membangun karakter bangsa di era global. Salah satu nilai kearifan lokal yang dikenal di Gorontalo adalah '*pulanga*'.

'*Pulanga*' adalah proses penobatan dan pemberian gelar adat. *Pulanga* (pemberian Gelar Adat) pada hakikatnya mengukur seseorang dalam jabatannya sebagai sumber pola anutan dalam setiap *o' oliyo'o* (gerakan), sebagai pemimpin negeri. Pemimpin yang diberi gelar *Ta'uwa* harus memenuhi dua persyaratan: (1) telah menghasilkan karya-karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat disebut *Ilomata*; dan (2) dinilai oleh masyarakat adat sebagai orang yang memiliki sifat-sifat kepemimpinan *Mo'odelo*. Sifat-sifat kepemimpinan *Mo'odelo* adalah sifat-sifat kepemimpinan yang sesuai dengan perintah Allah swt. dan ajaran-ajaran Islam yang berperan sebagai '*Mo'oiyoto Allah, wo lo Nabi mursalah lo wali u sagala*' yang artinya Penyambung titah Allah swt., sabda para Nabi dan para Wali). *Ta'uwa* menjadi wakil Tuhan di dunia (khalifah) dan sifat-sifat Tuhan dibagikan (*pilo pobo'o liyo*) kepadanya. Botutihe mendeskripsikan sifat-sifat kepemimpinan *Mo'odelo* memiliki karakteristik; (1) **Dudelo**, yang

²⁴ *Ibid*, h. 126.

bermakna bawaan atau sifat-sifat bawaan sejak lahir dan pembawaan atau perilaku, (2) **Mo'ulindlapo** adalah sifat yang merupakan gabungan dari kecerdasan berpikir dan kecekatan bekerja, (3) **Dulohupa** yang berarti musyawarah mufakat. Prinsip-prinsip *Dulohupa* yang harus dipegang teguh oleh pemimpin (4) **Huyula** yang bermakna gotong royong secara sukarela. Pemimpin harus membuktikan bahwa dirinya telah bekerja secara huyula untuk kepentingan umum, (5) **Balata-Yipilo** adalah ketegaran dan kekokohan dalam menghadapi kesulitan dan kesenangan, ketegasan dalam mengambil keputusan dan keberanian/keterbukaan dalam menerima kritik, (6) **Dunguto, Ponuwo dan Loyode**. *Dunguto* adalah kecintaan terhadap sesama manusia, lingkungan dan segala ciptaan Allah yang menjadi landasan bertutur kata. Nilai-nilai yang dikandung pada proses '*memulangal'pulanga*' ini akan dapat dikembangkan dalam pembinaan karakter masyarakat Gorontalo. Pengembangan karakter dapat dilakukan melalui jalur formal (pendidikan, pemerintahan dan kebudayaan) maupun jalur informal berupa kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Botutihe, M. 2006, *Mo'odelo. Sifat dan Perilaku Pemimpin Berdasarkan Nilai Lokal Gorontalo*. Pustaka Gorontalo. Gorontalo.
- Botutihe, M dan Farha Daulima. 2003, *Tata Upacara Adat Gorontalo*. Pemerintah Kota Gorontalo.
- Califord, Greetz, 1973, *The Interpretaion of Cultures*. New York : Basic Books, Inc, Publishers.
- Haga, B.J. 1931, *Lima Pahalaa. Susunan Masyarakat Hukum Adat dan Kebijakan Pemerintah di Gorontalo*. Pusat Kajian dan Pengembangan Kebudayaan Gorontalo. IKIP Negeri Gorontalo
- Juwono, H. dan Y. Hutagalung. 2005, *Limo lo Pohalaa. Sejarah Kerajaan Gorontalo*. Penerbit Ombak. Yogyakarta
- Kemendiknas. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta
- Nur, S. R. 1979, *Beberapa Aspek Hukum Adat Tatanegara Kerajaan Gorontalo pada Masa Pemerintahan Eato (1673-1679)*. Disertasi. Universitas Hasanudin. Ujung Pandang.
- Tuloli, Nani.,*et all Membumikan Islam : Seminar Nasional Pengembangan Kebudayaan Islam Kawasan Timur Indonesia*, Gorontalo : Pusat

Penelitian dan Pengkajian, Badan Pengembangan Kebudayaan Islam Kawasan Timur Indonesia, 2004

Wagiran, et al. 2010. *Pengembangan Model Pendidikan Kearifan local di Wilayah Provinsi DIY dalam mendukung Perwujudan visi Pembangunan DIY menuju tahun 2025 tahun kedua*. Yogyakarta : Biro Administrasi Pembangunan.

<http://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/1283/1067>